

# **BOARDING SCHOOL: MODEL PENDIDIKAN TRANSFORMATIF**

**Kaimuddin**

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Alauddin Makassar

Email: kalm\_must@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Seiring dengan semakin besarnya perhatian serta ikhtiar pemerintah untuk menggenjot peningkatan kualitas (mutu) pendidikan berbasis karakter, muncul fenomena penyelenggaraan pendidikan berpola *boarding school*. Jika ditelisik sejarah pendidikan Indonesia, dalam kaitannya dengan fenomena tumbuh kembangnya pola penyelenggaraan pendidikan *boarding school*, ditemukan bahwa secara substantif pola *boarding school* bukan merupakan pola pendidikan baru yang tidak memiliki riwayat pola pendidikan ke-Indonesiaan. Pola pendidikan *boarding school* memiliki kemiripan dengan pola pendidikan pesantren. Selain itu, jika ditelusuri pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Pendidikan Taman Siswa (1922), Muhammad Syafe'i yang mendirikan Ruang Pendidikan *Indonesische Nederlandsche School (RP INS)* kayutanam (1925), dan K.H. Ahmad Dahlan yang mendirikan *Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah* (1911), didapati setidaknya tiga tokoh ini secara kontekstual telah meletakkan ide-ide dasar bahkan menginspirasi tumbuh kembangnya pola pendidikan *boarding school* di tanah air. Dari gagasan beberapa tokoh tersebut, *boarding school* disimpulkan sebagai pendidikan transformatif dengan beberapa alasan; (1) *boarding school* memprioritaskan proses integrasi capaian pembelajaran antara kognitif, afektif, dan psikomotorik; (2) *boarding school* mengupayakan penyatuan lingkungan pendidikan, yaitu; lingkungan pendidikan formal, nonformal, dan informal; (3) *boarding school* memadukan pola dan muatan kurikulum, antara sekolah dan pondok pesantren.

**Kata kunci:** *boarding school*, pendidikan transformatif.

## A. PENDAHULUAN

Ikhtiar untuk melakukan perubahan dan memajukan pendidikan nasional menunjukkan fenomena yang cukup dinamis. Hal tersebut ditandai dengan adanya produk kebijakan-kebijakan baru dalam pendidikan nasional. Hanya saja dinamika tersebut seolah paradoks, karena pada kenyataannya sejarah pendidikan nasional belum pernah sampai pada suatu capaian optimal yang membanggakan dan diakui oleh dunia pendidikan. Bahkan hingga kini kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan bangsa. Mulyasa menyebutkan mutu *output* pendidikan Indonesia masih rendah dibandingkan dengan mutu *output* pendidikan di negara lain, baik di Asia maupun di kawasan Asean<sup>1</sup>. Bahkan Anis Baswedan selaku menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa pendidikan Indonesia gawat darurat<sup>2</sup>. Mencermati gambaran realitas ini, perlunya perubahan dan pengembangan pendidikan yang lebih signifikan, visioner, konstruktif, dan bahkan radikal menjadi suatu keniscayaan.

Sekilas gambaran kondisi pendidikan nasional di atas, mengisyaratkan bahwa perubahan pendidikan yang dilakukan dari masa ke masa dikelola apa adanya, bukan terkelola dengan prinsip “apa yang semestinya” dan atau “seharusnya”. Artinya, hal tersebut merupakan indikator adanya kegagalan sistem pendidikan. Indikator lainnya yang dapat menggambarkan bentuk kegagalan pendidikan Indonesia adalah adanya perubahan atau pergantian kurikulum dalam setiap waktu tertentu<sup>3</sup>. Hal mana sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, kurikulum telah mengalami pergantian sebanyak sebelas kali. Namun pergantian tersebut belum mampu dan belum pernah mengantarkan kondisi pendidikan Indonesia ke masa yang gemilang. Artinya, baik produk kebijakan pendidikan maupun sistem dan standar pengelolaan pendidikan nasional belum mencapai standar capaian kualitas yang diharapkan. Bahkan menurut Winarno Surakhmad,

---

<sup>1</sup>Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung; Remaja Rosda Karya, 2014, hal. 13.

<sup>2</sup>Anis menyatakan saat acara silaturahmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, tanggal 1 Desember 2014, dapat di lihat di alamat ; <http://www.slideshare.net/faizahfahmi/paparan-menteri-kadisdik-141201-low-v0>.

<sup>3</sup>Hal ini bermakna, bahwa dari aspek jarak waktu perubahan tidak menentu, ada yang jaraknya lebih sepuluh tahun diganti dengan kurikulum baru, ada yang kurang dari sepuluh tahun, bahkan ada hanya dua tahun masa digunakannya kemudian berganti lagi. Secara teoritis maupun empirik, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Hanya saja perubahan kurikulum memiliki motif di luar dari kepentingan pendidikan. Aroma kepentingan politik sangat kuat tercium setiap terjadi perubahan kurikulum. Hal ini sebagaimana disinyalir oleh Kunandar, bahwa ada rumor yang berkembang dalam masyarakat bahwa ada kesan “ganti menteri pendidikan ganti kurikulum”. Selanjutnya lihat Kunandar. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 85

paradigma yang mendominasi kebijakan pendidikan nasional sejak semula lebih banyak bersifat statis, reaktif, formalistik, dan konservatif (bertahan). Pendidikan Indonesia seakan tidak pernah punya impian, motivasi, keterbukaan, komitmen, keberanian serta determinasi untuk berubah dan senantiasa berubah dalam mencapai yang terbaik.<sup>4</sup>

Sekaitan dengan realitas pendidikan nasional, terdapat berbagai fenomena yang memprihatinkan. Tawuran antar pelajar di berbagai tempat, praktek asusila yang dilakukan oleh remaja usia sekolah cukup mencengangkan, begal motor, fenomena remaja pengguna dan pengedar narkoba, dan berbagai bentuk kejahatan atau tindak kriminal lainnya yang dilakukan oleh anak usia sekolah. Fenomena ini tentu tidak terlepas dari kondisi pendidikan nasional yang masih terus berbenah.

Seiring dengan fenomena yang memprihatinkan di atas, terdapat fenomena lain yang cukup penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan pendidikan di Indonesia. Di antara fenomena yang dimaksud adalah tumbuh kembangnya sistem layanan pembelajaran alternatif, misalnya dewasa ini menjamur Lembaga Bimbingan Belajar (LBB), kursus-kursus atau dalam bentuk les. Fenomena ini, berkembang dan meluas dari waktu ke waktu, tingkat nasional hingga pelosok kabupaten dan Kota. Pilihan peserta didik untuk belajar pada lembaga pembelajaran alternatif tersebut memiliki konsekuensi tambahan pembiayaan, ternyata tidak menjadi masalah bagi orang tua tertentu. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya peminat lembaga pendidikan tersebut. Fenomena ini, mencerminkan bangkitnya kesadaran masyarakat yang butuh pendidikan berkualitas, sekalipun ada konsekuensi pembiayaan. Sementara pada saat yang sama kebijakan pendidikan nasional telah menggratiskan pembiayaan pendidikan anak pada usia sekolah<sup>5</sup>. Kesadaran masyarakat untuk siap berpartisipasi dalam

---

<sup>4</sup>Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi* (Jakarta; Kompas Media Nusantara. 2009), h. 127

<sup>5</sup>Isu penggratisan pendidikan di sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan SD sederajat, SMP sederajat, serta SMA sederajat merupakan suatu yang populer sepuluh tahun terakhir, bersamaan dengan proses politik demokrasi di negara ini. Populernya semakin terasa saat proses berlangsungnya pemilihan secara langsung dari tingkat Kepala Daerah Kabupaten dan Walikota untuk Kotamadya, pemilihan Gubernur di tingkat propinsi, serta pemilihan presiden. Terlepas penggunaan isu pendidikan gratis, apakah dipahami dasar hukumnya atau sekedar dijadikan “jualan” politik pemilihan langsung, dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan, ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun’. Selanjutnya Pasal 49 ayat 1, dinyatakan, ‘Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)’. Ketentuan tentang alokasi anggaran pendidikan dalam pasal Undang-Undang tersebut, memungkinkan adanya tafsiran bahwa

pembiayaan pendidikan, dan kebijakan pendidikan gratis, merupakan dua sikap yang sifatnya anomali. Pada satu sisi munculnya kesadaran masyarakat berpartisipasi karena adanya kebutuhan akan kualitas pendidikan, dan adanya kebijakan pendidikan gratis sebagai tuntutan dari Undang-Undang di sisi lain. Sejatinya, masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan gratis sekaligus berkualitas.

Hal mendasar yang perlu ditelusuri dalam kaitan ini adalah apa yang salah dalam pendidikan nasional? Apa yang menjadi problematika mendasar dalam pendidikan nasional? Siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi pendidikan Indonesia? Akan dibawa kemana generasi anak bangsa? Deretan pertanyaan ini penting karena beberapa alasan utama. *Pertama*, pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun kehidupan bangsa dan negara. *Kedua*, pendidikan merupakan simbol kemajuan peradaban bangsa. *Ketiga*, pendidikan mendorong kesejahteraan anak bangsa. *Keempat*, pendidikan merupakan gerbang utama mewujudkan cita-cita luhur bangsa, terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. *Kelima*, pendidikan merupakan variabel yang sangat menentukan masa depan bangsa.

Dengan mencermati struktur argumentasi di atas dapat dinyatakan bahwa ada dua problem mendasar dalam pendidikan nasional. Yaitu; (1) penguasaan kompetensi yang tidak kompetitif dalam capaian pendidikan nasional. Capaian kompetensi yang diperoleh atau dimiliki peserta didik dalam luaran pendidikan nasional tidak memiliki daya saing yang tinggi dan keunggulan yang kompetitif; (2) adanya nilai-nilai kepribadian peserta didik yang menyimpang dari nilai-nilai yang terdapat dalam capaian pendidikan nasional. Krisis kepribadian yang dimaksud, yaitu perilaku dominan peserta didik yang jauh dari nilai moral, etika, budi pekerti luhur, karakter, atau akhlak mulia<sup>6</sup>.

---

dengan alokasi anggaran pendidikan yang fantastis, maka biaya pendidikan dapat digratiskan. Lihat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta; Visimedia, 2007), h. 7-23.

<sup>6</sup>Kedua problem mendasar pendidikan nasional yang diulas di atas, senada dengan yang dipaparkan Professor Muljani A. Nurhadi, problem pendidikan nasional, diantaranya; (1) adanya *fallacy* yang mendasar antara relasi pendidikan dengan ketenagakerjaan, antara kompetensi hasil pendidikan nasional (*supply*) dengan kesempatan kerja (*demand*). Dalam konteks akan adanya MEA, maka akan menjadi tantangan besar untuk memikirkan relasi antara pendidikan dan ketenagakerjaan. Mungkinkah Indonesia mampu mengatasi ditengah kekhawatiran berbagai pihak? ; (2) adanya keterancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat asimilasi, akulturalisasi, dan adaptasi budaya belum mapan. Artinya, relasi pendidikan dan kewarganegaraan, perlu menjadi perhatian utama. Telah menjadi fenomena sosial betapa mudahnya terjadi konflik antar komponen bangsa dengan ragam latar belakang pemicu konflik. Padahal sejatinya, pendidikan menjadi wadah bersemainya semangat nasionalisme, patriotisme, bela Negara, dan itu merupakan penanda betapa pentingnya pendidikan karakter bangsa. Prof. Nurhadi, paparkan saat beliau menyampaikan kuliah umum di PPS Universitas Negeri Makassar (UNM), 11 Nopember 2015.

Kedua problem mendasar tersebut dapat diurai dalam berbagai ragam problem pendidikan nasional. Yaitu problem dalam masalah tata kelola pendidikan, masalah kurikulum, masalah sarana dan prasarana pendidikan, masalah kompetensi guru. Selain itu, hal ini dapat juga dilihat dalam masalah tawuran pelajar, masalah pergaulan bebas pelajar, dan lain sebagainya. Munculnya beragam problem tersebut, memerlukan penanganan yang sifatnya komprehensif, sistematis, dan sistemik.

Upaya untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan perlu memperhatikan landasan pijakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan perbaikan pendidikan nasional. Upaya yang akan ditempuh merupakan pilihan solusi alternatif, yang menghindarkan dari pola upaya ‘tambal sulam’ yang pragmatis. Sebaliknya, solusi yang ditawarkan lebih konstruktif transformatif. Hal ini dapat dicapai jika upaya perbaikan yang dilakukan berlandaskan pada kerangka dasar yang kuat serta mampu dipertanggungjawabkan melalui pengembangan landasan filosofis, sosiologis, psikologis, serta landasan agama. Dasar-dasar pertimbangan tersebut, dapat dijelaskan melalui pengembangan lembaga pendidikan alternatif, sebagaimana yang dikembangkan dalam sistem *boarding school*.

Untuk memahami secara komprehensif dan mendalam terhadap *boarding school*, maka di bawah ini akan di ulas:

1. *Boarding school* merupakan suatu fenomena baru dalam penyelenggaraan pendidikan Indonesia.
2. *Boarding school* sebagai pendidikan transformatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. *Boarding School*: Fenomena “baru” dalam Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia**

Jika ditelisik fenomena tumbuh kembangnya model pendidikan *boarding school* di tanah air, sebenarnya *boarding school* bukan merupakan pola pendidikan baru yang tidak memiliki riwayat pola pendidikan ke-Indonesiaan. Lailatul Faizah menyebutkan, Pondok Pesantren adalah cikal bakal *Boarding School* di Indonesia.<sup>7</sup> Seiring dengan fenomena *boarding school*, juga muncul suatu model pendidikan lain yang disebut “*full-day-school*”, yang menurut Nurani Suyomukti, merupakan pesantren modern yang mengadopsi sistem pendidikan modern, yang bertujuan untuk memaksimalkan pencerdasan dan pembentukan mental

---

<sup>7</sup>Lailatul Faizah. *Kolaborasi Pendidikan Formal dan Boarding School* dalam <http://lailafaizah.blogspot.co.id/2012/07/kolaborasi-pendidikan-formal-dan.html>.

anak-anak.<sup>8</sup> Bahkan jika ditelusuri sejarah pendidikan Indonesia lebih jauh lagi, dapat ditemukan sejumlah Tokoh pendidikan yang telah meletakkan ide-ide dasar “bangunan pendidikan” *boarding school*, diantaranya:

- a) Ki Hajar Dewantara, yang mendirikan pendidikan kebangsaan yang populer dengan nama Taman Siswa (1922). Ajarannya dipakai sebagai lambang Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), yaitu *Ing Ngarso Sung Tulodo* bermakna seorang guru hendaknya memberi teladan yang baik kepada murid-muridnya, *Ing Madya Mangun Karso* bermakna seorang guru harus terus untuk membuat inovasi dalam pembelajaran, dan *Tut Wuri Handayani* menyiratkan seorang pendidik harus dapat membangkitkan motivasi, memberikan dorongan pada anak didiknya untuk terus maju berkarya dan berprestasi.<sup>9</sup> Selanjutnya, pola pendidikan yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara adalah sistem pondok dan *pewiyatan*. Beliau menjelaskan sistem pondok dan *pewiyatan* itu besar sekali faedahnya sebagai usaha pengajaran nasional. Faedahnya: a) dapat menghemat pembiayaan karena murid-murid dan guru-guru serta pengasuhnya belanja dan makan secara bersama-sama; b) dengan cara pondok dan pawiyatan dapat dilangsungkan dunia kesiswaan atau pencantrikan, yaitu dunia pendidikan. Dimana guru-guru dan murid-murid tiap hari hidup bersama-sama, siang malam. mereka makan, bermain, belajar, bergaul secara bersama-sama. Hal ini akan menciptakan pendidikan yang sempurna, tidak menurut buku-buku paedagogik, tetapi menurut paedagogik yang hidup, yaitu menurut cara hidup yang nyata dan baik<sup>10</sup>. Hal tersebut dapat dipahami, bahwa proses pendidikan tidak hanya berlangsung dalam bentuk transfer kognitif melalaui *teks book* yang lazimnya hanya berlangsung pada empat batas dinding kelas, melainkan suatu proses pendidikan yang hidup di dalam dan di luar kelas, yang termanivestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian di dalam lingkungan pendidikan pondok. Suasana pendidikan seperti ini, merupakan cerminan penyatuan tiga lingkungan pendidikan antara rumah, sekolah, dan masyarakat.
- b) Muhammad Syafei, tahun 1925 kembali dari negeri Belanda. Selama tiga tahun di negeri Belanda ia memperdalam ilmu musik, menggambar, pekerjaan tangan, sandiwara, dan juga memperdalam pendidikan dan keguruan.

---

<sup>8</sup>Nurani Suryomukti. *Teori-Teori Pendidikan dari Tradisonal (Neo) Liberal, Marxis, Sosialis, hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), h.116.

<sup>9</sup>M. Sukardjo. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 96.

<sup>10</sup>Nyi Hajar Dewantara. *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), h. 370.

Setahun kemudian, oleh ayahnya ia diserahkan ke suatu lembaga pendidikan, yang kemudian sekolah tersebut tersohor dengan nama Ruang Pendidikan *Indonesische Nederlandsche School (RP INS)* kayutanam, yang bertujuan untuk mendidik anak-anak agar dapat mandiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka.<sup>11</sup> Penyelenggaraan pendidikan INS menggunakan pola pendidikan asrama. INS terus mengalami perkembangan dengan terbangunnya asrama, yang dilengkapi dengan satu ruang makan dan dapur, restoran, gedung koperasi, lapangan tennis, kolam renang dan bersampan, kolam tambak ikan, taman bacaan, lapangan, ruang ibadah, ruang workshop (ruang teori dan praktek), pasanggrahan, ruang auditorium (teater dan pameran), kebun percobaan, ruang peternakan, dua rumah peranginan, tribun lapangan bola dengan kamar pakaian, ruang music, politeknik, dan delapan ruang belajar. Kapasitas asrama 300 orang dan tiga perumahan guru, dengan jumlah murid 600 orang. Biaya operasional diperoleh dari pelbagai kerajinan tangan siswa dan kreativitas lainnya, seperti dengan menggelar pertunjukan dengan tiket terjangkau. Lembaga pendidikan ini tidak menerima subsidi dari pihak mana pun termasuk dari pemerintahan Belanda.<sup>12</sup>

Pola pendidikan pengasramaan yang bertujuan untuk membangun sikap mandiri para siswa melalui bekal berbagai kecakapan hidup yang diberikan, menunjukkan bahwa model pendidikan yang dikembangkan oleh Muhammad Syafei merupakan pendidikan integratif, yang memadukan pengetahuan dan keterampilan serta karakter. Karakter yang dimaksud adalah penanaman nilai kemandirian dan tanggungjawab para siswanya.

- c) K. H. Ahmad Dahlan, merupakan Tokoh utama sekaligus pendiri Muhammadiyah tahun 1912. Sukardjo menyebutkan, Ahmad Dahlan secara pribadi merintis pembentukan sebuah sekolah yang memadukan pengajaran ilmu agama Islam dan ilmu umum. setelah proses belajar mengajar di sekolah yang dirintis mulai teratur, akhirnya diresmikan pada tanggal 1 Desember 1911 dan diberi nama *Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah*.<sup>13</sup>

Dengan demikian, ide Ahmad Dahlan berkenaan dengan model pendidikan yang terintegrasi antara ilmu-ilmu ke-Islaman dan ilmu-ilmu umum sudah

---

<sup>11</sup>M. Sukardjo. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 101.

<sup>12</sup>M. Sukardjo. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 102.

<sup>13</sup>M. Sukardjo, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 104.

memberikan alternatif sekolah untuk generasi saat itu. Tentu saja jika menelaah lebih mendalam ide ini, dapat menjadi inspirasi untuk terwujudnya sebuah lembaga pendidikan. Karena salah satu problem besar dunia pendidikan hingga sekarang, khususnya yang tersebar dalam lembaga pendidikan Islam negeri maupun swasta, adalah upaya integrasi IMTAQ dan IPTEKS yang masih perlu disempurnakan.

## 2. *Boarding School* sebagai Pendidikan Transformatif

Deskripsi fenomena *boarding school* di atas, sepintas dapat diperhatikan dan dipahami bahwa fenomena lahirnya *boarding school* merupakan konsekuensi ilmiah dan sebagai komitmen moral terhadap masa depan pendidikan anak bangsa. Konsekuensi ilmiah yang dimaksud adalah tuntutan kesadaran rasional-empirik terhadap dialektika sejarah pendidikan Indonesia yang eksperimentatif sejak sebelum merdeka hingga dewasa ini, yang akhirnya *boarding school* menjadi suatu realitas atas sebuah alternatif model pendidikan. Komitmen moral, merupakan manifestasi sikap ideologis anak bangsa yang memotivasi, menginspirasi, serta mengantisipasi perlunya ikhtiar “penyelamatan” nilai karakter generasi masa depan bangsa melalui pendidikan. Senada dengan hal tersebut, Mansour Fakih, dalam potongan penggal kalimatnya menyebutkan bahwa pada umumnya orang memahami pendidikan sebagai kegiatan mulia yang selalu memuat kebajikan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka diramu beberapa asumsi-asumsi untuk menyederhanakan pemahaman kita terkait keberadaan *boarding school* sebagai lembaga pendidikan alternatif transformative. Pertama, *boarding school* memprioritaskan proses integrasi capaian pembelajaran antara kognitif, afektif, dan psikomotorik<sup>15</sup>. Artinya peserta didik tidak hanya disuguhi ilmu pengetahuan, melainkan secara integratif ditanamkan afektif serta pengembangan kognitifnya. Kedua, *boarding school* menselaraskan penyatuan lingkungan pendidikan, yaitu; lingkungan pendidikan formal, nonformal, dan informal.<sup>16</sup> Pendidikan

---

<sup>14</sup>Mansour Fakih. “Pengantar” dalam William F. O’neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. x.

<sup>15</sup>Dalam istilah bahasa agama, kognitif itu sama dengan ilmu, afektif sama dengan iman, dan psikomotorik disebut amal. Jadi ilmu-iman-amal. Demikian halnya dengan peristilahan yang sering digunakan Ari Ginanjar dalam latihan-latihan ESQ yang dikembangkannya, kognitif-ilmu disebut *intellectual quotion*, afektif-iman disebut *spiritual quotion*, dan psikomotorik-amal merupakan *emosional quotion*.

<sup>16</sup>Pandangan perlunya penyatuan pendidikan formal dan nonformal juga di ulas oleh Suparlan Suhartono dengan mengemukakan bahwa antara lembaga pendidikan sekolah dan kehidupan masyarakat tidak boleh terjadi disharmoni, karena lembaga pendidikan sekolah adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat.

di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat diintegrasikan. Hal ini biasa disebut menyatunya tri pusat pendidikan. Ketiga, *boarding school* memadukan pola dan muatan kurikulum sekolah modern dan pondok pesantren. Hal ini berbeda dengan pandangan umum yang mengedepankan pemikiran dikotomis yang memahami bahwa ilmu-ilmu umum dikembangkan di sekolah umum sedangkan ilmu-ilmu agama dikembangkan di pondok pesantren. Hal ini berimplikasi negative bahwa kalau kita mau menjadi ilmuwan dan intelektual maka masuklah di pendidikan sekolah, sedangkan untuk menjadi ulama dan kyai hanya cocok belajar di pendidikan pesantren. Jika kedua pola pendidikan ini dipadukan, maka akan melahirkan profil ulama yang intelektual dan atau intelektual yang ulama. Ulama yang intelektual maksudnya seseorang yang tidak hanya fasih mengenai firman Allah atau menguasai ayat-ayat tanziliah melainkan sekaligus memahami dan menguasai teori-teori ilmu pengetahuan atau ayat-ayat kauniyah. Demikian pun sebaliknya, mengenai profil intelektual yang ulama.

Bilamana asumsi-asumsi di atas diarahkan untuk pengembangan pendidikan kini dan mendatang, maka fenomena *boarding school* merupakan suatu keniscayaan. *boarding school* mencerminkan sikap progressif dan menggambarkan sikap optimis untuk memajukan pendidikan bangsa. Dengan demikian *boarding school* akan menjadi suatu alternatif penyelenggaraan pendidikan di tanah air, dan akan menjadi pendidikan “primadona” masyarakat Indonesia.

*Boarding School* bukan hanya merupakan ijtihad cerdas, melainkan ramuan ide-ide dasar pendidikan yang lahir dalam suasana perlawanan, yang direkonstruksi dan direvitalisasi dalam konteks sekarang. Meminjam istilah Paulo Freire, bahwa salah satu prinsip pendidikan kritis transformatif adalah praxis, yakni menyatunya kemampuan berpikir, berbicara, dan berkarya. Oleh sebab itu, model *boarding school* merupakan pendidikan yang praxis.

### C. PENUTUP

Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa titik simpul, yaitu :

1. Model pendidikan *boarding school* yang tumbuh dan berkembang dewasa ini di Indonesia dapat bukan pola pendidikan baru yang tidak memiliki riwayat pola pendidikan ke-Indonesiaan. Pondok Pesantren adalah cikal bakal *Boarding School* di Indonesia. Demikian juga, gagasan tentang ide dasar *boarding school* telah diinisiasi dan diinspirasi dari beberapa tokoh pendidikan Indonesia. Diantaranya; Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafei, dan K.H. Ahmad Dahlan.

2. Munculnya fenomena *boarding school* merupakan konsekuensi ilmiah dan konsekuensi komitmen moral terhadap masa depan pendidikan anak bangsa. Konsekuensi ilmiah yang dimaksud adalah tuntutan kesadaran rasional-empirik terhadap dialektika sejarah pendidikan Indonesia yang eksperimentatif sejak sebelum merdeka hingga dewasa ini, yang akhirnya *boarding school* menjadi suatu realita atas sebuah alternatif model pendidikan. Komitmen moral karena *boarding school* merupakan manifestasi sikap ideologis anak bangsa yang memotivasi, menginspirasi, serta mengantisipasi perlunya ikhtiar “penyelamatan” nilai karakter generasi masa depan bangsa. Pendidikan *boarding school* merupakan suatu keniscayaan yang dapat mencerminkan sikap progressif yang merupakan prinsip dasar terwujudnya proses pendidikan transformative. Selain itu, sikap optimisme untuk memajukan pendidikan bangsa termuat dalam sistem pendidikan *boarding school*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, Ki Hajar. *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977.
- Faizah, Lailatul. *Kolaborasi Pendidikan Formal dan Boarding School*, dalam <http://lailafaizah.blogspot.co.id/2012/07/kolaborasi-pendidikan-formal-dan.html>.
- <http://www.slideshare.net/faizahfahmi/paparan-menteri-kadisdik-141201-low-v0>.
- Kunandar. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Sukardjo. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mansour Fakih “Pengantar” dalam William F. O’neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung; Remaja Rosda Karya, 2014.
- Surakhmad, Winarno. *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. Jakarta; Kompas Media Nusantara. 2009.
- Suryomukti, Nurani. *Teori-Teori Pendidikan dari Tradisional (Neo) Liberal, Marxis, Sosialis, hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta; Visimedia, 2007.